

KEBIJAKAN DAN PELAYAN PUBLIK

“Konsep dan Teori Pendapatan”



Dr. Sabri, SE., MM., ME., MM., CRBD
Merry Lucyana., SE., MM
Aulia Fauziah, S. Ak., MM
Dian Destria, SE., MM
Afrina Yenni, SE., MM

KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK "

Konsep dan Teori Pendapatan"

Penulis:

Dr. Sabri, SE., MM., ME., MM., CRBD

Merry Lucyana, SE., MM

Aulia Fauziah, S. Ak., MM

Dian Destria, SE., MM

Afrina Yenni, SE., MM



KEBIJAKAN DAN PELAYAN PUBLIK “Konsep dan Teori Pendapatan”

Copyright © PT Penamuda Media, 2025

Penulis:

Dr. Sabri, SE., MM., ME., MM., CRBD

Merry Lucyana., SE., MM

Aulia Fauziah, S. Ak., MM

Dian Destria, SE., MM

Afrina Yenni, SE., MM

E-ISBN: 978-634-7062-79-6

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: @penamudamedia

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Maret 2025

VIII + 154 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Hormat kami,

Alhamdulillah wasyukurillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini". Buku ini disusun guna memfasilitasi agar mahasiswa serta masyarakat dan juga pengamat kebijakn public lebih mampu memahami mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan dan pelayanan public serta sumber pendapatan daerah dan juga baimana mengelolanya"

Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan buku ini yang berjudul ***KEBIJAKAN DAN PELAYAN PUBLIK “Konsep dan Teori Pendapatan.*** Buku ini dirancang untuk menjadi panduan komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami dan tentang kibijakan dan pelayanan publik.

Standar Pelayanan mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapat pelayanan. Bagi Pemerintah Daerah Standar Pelayanan menjadi tolak ukur (benchmark) penentuan yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan urusan wajib. Dengan adanya Standar Pelayanan akan menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan yang tersedia Pemerintah Daerah.

Alhamdulillah, buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan dipraktekkan oleh instansi terkait yang terlibat langsung dalam pengambil kebijakan. Buku ini juga berisikan tentang potensi pajak dan retribusi daerah dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kiranya buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan setiap orang yang memerlukan pemahaman akan aspek-aspek pemerintahan; penyelenggaraan pemerintahan di daerah; pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan birokrasi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan public di Indonesia, dengan penuh harapan semoga dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu, diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang kebijakan dan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca serta masyarakat umm lainnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Terimakasih kami yang tak terhingga kepada semua

pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Wassalam.

Bukittinggi, Maret 2025

Hormat Kami,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PEMERINTAH DAERAH	9
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK	23
BAB III PELAYAKAN PUBLIK	43
BAB IV TEORI PELAYAN PUBLIK.....	48
BAB V KONSEP DASAR PAJAK	74
BAB VI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	100
BAB VII PIUTANG PAJAK.....	104
BAB VIII STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASI DAERAH (PAD).....	114
BAB IX MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH.....	130
DAFTAR PUSTAKA	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	152

BAB 1

PEMERINTAH DAERAH



A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip otonomi diseluruh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari dua tingkat utama: Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh Gubernur dan bertugas mengkoordinasikan kabupaten/kota, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota dan bertanggung jawab atas administrasi serta pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah daerah menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta telah merubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi

KEBIJAKAN DAN PELAYAN PUBLIK

“Konsep dan Teori Pendapatan”

Pemerintah daerah merupakan organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya secara mandiri dalam rangka desentralisasi. Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Selain itu sumber keuangan daerah yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah yang potensial di dalam suatu wilayah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah, namun pemerintah pusat masih memberikan bantuan dengan porsi yang sangat terbatas. Tingkat otonomi daerah akan semakin meningkat seiring dengan kemandirian keuangan daerah.

Untuk menjawab tantangan mengenai persoalan pelayanan dan kebijakan public serta bagaimana pengelolaan keuangan daerah maka buku ini sedikit banyaknya dapat menjawab persoalan tersebut. Buku ini membahas mengenai pemerintah daerah, kebijakan dan pelayanan public, sumber pendapatan daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta bagaimana pengelolaan piutang yang bersumber dari pajak daerah tersebut. Mudah mudahan buku ini dapat memberikan pemahaman dan ilmu bagi semua pembaca terutama yang akan menekuni dan mendalami kebijakan serta pelayanan public di daerah.



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com